KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

1										
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 N	A.1 NPWP : 7 3 1 7 5 3 3 7 2 6 2 9 0 0 0									
A.2 NIK :										
A.3 Nama : FISA DESIDUA WISMANDIRI										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7			
	4 21-402-01			555.200	555.200	0	5	27.760		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022										
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm						· mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>			
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
R 10	Nomor : Tanggal dd mm yyyy									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
C.2 Nama Instansi Pemerintah :		RUMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :										
C.4	.4 Tanggal :		1 3	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5	Nama Penandatangan : <u>HAR</u>		HARI	IUMADI						
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara		

YGA5LODJ